

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi ditandai dengan kenaikan pesat sebuah teknologi informasi. Maka dari itu, sebuah organisasi privat maupun publik dituntut lebih peka terhadap perubahan-perubahan informasi yang berkembang sangat cepat agar pengambilan keputusan dihasilkan secara efektif dan efisien. Semua organisasi, termasuk organisasi publik, diharuskan mengembangkan informasi tentang teknologi mereka dikarenakan untuk memperlancar terwujudnya suatu tujuan yang telah diharapkan oleh organisasi tersebut. Teknologi informasi juga dapat membantu mengatur organisasi dalam proses komunikasi, dengan saling koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi.

Hubungan Masyarakat atau biasa disingkat HUMAS adalah pekerjaan yang mempunyai tugas mengelola suatu informasi baik untuk individu, kelompok, masyarakat dan sebagainya. Selain itu, tugas lain dari humas diantaranya adalah melobi sesuatu, dan membuat atau menyelenggarakan suatu acara. Sekitar tahun 1950-an humas mulai dikenal di Indonesia yang mempunyai tugas menjelaskan fungsi-fungsi dan peran setiap instansi, kementerian, lembaga, perusahaan, dan lain sebagainya. Dalam sebuah organisasi atau instansi, humas sangat berperan besar dalam setiap program kerja, hal ini disebabkan karena humas merupakan salah satu sumber informasi terbesar dalam setiap kegiatan. Bahwasanya kebutuhan akan informasi tidak hanya sebatas manusia dengan manusia lain, instansi dengan instansi lain, namun yang paling terpenting adalah instansi dengan masyarakat. Untuk meluncurkan program suatu instansi hendaknya terdapat fasilitator sebagai jembatan antara instansi tersebut dengan masyarakat. Kegiatan tentang segala sesuatu yang mengarah pada proses kerja aktivitas dalam menyebarluaskan informasi telah dilakukan sebelumnya, program pemerintah yang di laksanakan melalui sebuah instansi khusus agar mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah di dalam maupun luar lembaga dan masyarakat di dalam lingkup Kabupaten Lumajang.

Contoh tugas humas salah satunya adalah mensosialisasikan program-program instansi ataupun lembaga. Seperti humas yang ada pada Badan Narkotika Nasional, program-program yang diadakan BNN tidak lain adalah bertujuan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia adalah

negara hukum, diantaranya adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat agar Indonesia tertib. Seperti yang dirumuskan dalam UUD45, bahwa Hukum adalah pranata sosial, mempunyai fungsi untuk mengatur masyarakat. Indonesia adalah termasuk pada kategori negara berkembang, yang tingkat kejahatannya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju. Hal ini wajar dikarenakan tingkat ekonomi, sosial serta kesadaran di negara maju lebih baik daripada di negara berkembang. Dewasa Ini, Indonesia menjadi negara yang berpotensi untuk memproduksi dan mengedarkan narkoba. Peredar dan penyalahgunanya merata dan menjangkau segala penjuru, mulai dari kalangan sosial rendah hingga pejabat. Sasaran penyalahgunaan narkoba menjangkau semua kalangan, mulai dari pelajar, pengusaha, pejabat, aparat, hingga pegawai negeripun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Bisa disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak hanya bersasaran kepada orang yang tidak berpendidikan, namun juga merajalela sampai kepada orang yang berpendidikan sekalipun. Narkoba yang seharusnya memiliki manfaat positif untuk digunakan sebagai keperluan pengobatan dan pengetahuan, kini malah disalahgunakan dengan berbagai alasan tujuan oleh para perusak bangsa. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi permasalahan internasional dimana jumlah kasusnya tidak kunjung berkurang bahkan semakin hari kian bertambah. Permasalahan ini mempunyai tiga bagian yang saling terkait, yakni produksi gelap, perdagangan atau peredaran dan yang terakhir penyalahgunaan. Ketiga hal itulah yang menjadi masalah terbesar yang seharusnya diperangi oleh masyarakat agar tidak sampai kepada generasi yang akan datang.

Dalam rangka mensosialisasikan bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang (narkoba) kepada generasi muda, Badan Narkoba Nasional (BNN) termasuk BNNK Lumajang mengadakan Program P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) merupakan program yang menjadi tujuan utama BNN didirikan, sosialisasi P4GN ini dibawah tanggung jawab seksi P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) yang juga bekerjasama dengan seksi humas di setiap kegiatannya. Dalam menjalankan tugasnya tahapan yang dilakukan adalah melalui proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi guna melakukan kegiatan-kegiatan tertentu agar dapat mencapai tujuan bersama (Laporan Kinerja BNN 2015).

Program P4GN dilaksanakan melalui banyak kegiatan, salah satunya adalah sosialisasi di beberapa sekolah-sekolah dan juga di beberapa instansi-instansi di seluruh kabupaten Lumajang. BNN Kabupaten Lumajang juga selalu memanfaatkan momen untuk sosialisasi bahaya narkoba kepada warga-warga pedesaan. Seperti dilansir dari portal berita online Lumajangsatu, pada tanggal 1 februari 2018 kemarin, BNN kota Lumajang memanfaatkan momen Gerhana Bulan untuk mengadakan sosialisasi bahaya narkoba yang berlokasi di pesisir Pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Propinsi Jawa Timur. Tujuan BNN Kota Lumajang melakukan kegiatan ini, salah satunya dapat menikmati peristiwa luar biasa, berwisata dan juga bisa memberikan sosialisasi P4GN kepada sekitar 40 warga setempat. Salah satu warga setempat, Ahmad kepada media mengatakan kalau kegiatan semacam ini sangat bagus. Sebab bisa menambah wawasan warga yang belum mengerti akan mengerti bahaya dari narkoba.

Menurut portal berita online bangsaonline.com selama kurun waktu tahun 2017/2018, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang mengklaim telah melaksanakan semua kegiatan Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Lumajang. BNN Kabupaten Lumajang sudah melaksanakan sosialisasi P4GN dengan sasaran 45 institusi pendidikan, 50 kelompok masyarakat, 15 lingkungan pekerja, dan 15 institusi pemerintah di Lumajang. Hal ini dilakukan karena penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lumajang sudah cukup mengkhawatirkan, terbukti dari jumlah pengguna narkoba berbagai jenis yang direhabilitasi, mencapai 57 pengguna selama kurun waktu satu tahun. Dari jumlah itu, pengguna trihexypenidyl dan sabu paling mendominasi. Di hitung dari periode tahun 2017 hingga maret 2018 totalnya ada 61 pasien rehabilitasi di klinik BNN Kabupaten Lumajang.

Menurut portal berita suara surabaya, saat ini Kabupaten Lumajang telah memasuki peringkat 9 dalam kategori darurat peredaran dan menyalahgunaan narkoba tingkat provinsi. Data ini juga menyesuaikan dari hasil upaya pemberantasan yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian melalui jajaran satuan Reskorba Polres Lumajang. Selain mengatasi penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di Kabupaten Lumajang, BNN Kabupaten Lumajang juga ikut serta menangani di beberapa kabupaten yang sedang dalam proses pembentukan seperti di Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan data dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kabupaten Lumajang, jumlah kasus pengguna narkoba (yang terdeteksi) di Lumajang selalu mengalami kenaikan walaupun angkanya sedikit. Di tahun 2016 jumlahnya adalah 35 orang, 2017 ada 37 orang dan di tahun 2018 hingga bulan ini terdapat 42 orang, itu hanya yang terdeteksi saja, karena Lumajang adalah termasuk kabupaten yang sudah memasuki kategori Gawat Darurat narkoba. Selalu ada oknum-oknum yang melindungi pengguna atau pengedarnya, sehingga menghambat kepolisian dan BNN untuk melakukan pemberantasan. Selain menggunakan narkoba, juga banyak yang menggunakan bahan adiktif lainnya, seperti okerbaya dan juga psikotropika.

Ketua humas BNN Kabupaten Lumajang juga mengatakan, bahwasanya kegiatan penyuluhan P4GN ini lebih banyak diadakan di sekolah-sekolah, karena rawan pengguna paling banyak dari narkoba tersebut adalah dikalangan pelajar, khususnya pelajar menengah keatas. Namun BNN Kabupaten Lumajang juga mulai merancang kegiatan penyuluhan untuk semua usia pelajar, mulai dari TK, SD, SMP sampai SMA. Tentunya dengan teknik penyampaian tersendiri dan menyesuaikan umur mereka diharapkan agar pengetahuan tentang narkoba bisa diterapkan secara efisien di usia dini, karena pengedar narkoba tidak akan mengenal umur dalam mencari mangsa. Seperti kasus permen anak-anak yang dijual di sekolah-sekolah di kecamatan Klakah, Lumajang yang diduga menggunakan narkoba sehingga menimbulkan dampak ketagihan si anak agar terus menerus membeli permen tersebut, sehingga pengedar, pabrik maupun penjual akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Namun dalam kasus ini, BNN kabupaten Lumajang tidak tinggal diam, tim Humas dan beberapa sejumlah dari kepolisian mendatangi semua warung dan toko yang di duga menjual permen tersebut dan melakukan penebasan produk.

Selanjutnya, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah juga wajib membuka akses informasi seluas-luasnya tentang ancaman bahaya narkoba yang bisa jadi tanpa disadari keluarga, saudara atau bahkan lingkungan mereka ternyata berpeluang besar dapat di pengaruhi oleh para-para bandar yang tidak mempunyai hati nurani. Untuk melakukan kewajiban tersebut harus di eratkan sinergitas antara humas dan pihak-pihak yang terkait, seperti media, masyarakat, dan juga pengelola data informasi. Dengan adanya komunikasi yang serasi maka pekerjaan unit humas dapat berjalan lancar secara fungsional dan profesional.

Penyebaran informasi dinilai kurang maksimal dan meluas, dilihat dari kurangnya banner, kurangnya iklan layanan masyarakat, kurangnya kegiatan-kegiatan yang menarik yang melibatkan anak muda sebagaimana pemuda adalah sasaran empuk penyalahgunaan narkoba, kurangnya perhatian pemerintah atas daerah-daerah pelosok yang sulit dijangkau dan dengan mengingat pentingnya humas dalam menjembatani antara instansi dan masyarakat maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam bagaimana aktivitas humas dalam menginformasikan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kabupaten Lumajang. Untuk itu peneliti mengambil judul “Aktivitas Humas dalam menyebarluaskan informasi tentang program sosialisasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)”

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Aktivitas Humas BNN Kabupaten Lumajang dalam menyebarluaskan informasi Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kabupaten Lumajang?”

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas Humas BNN Kabupaten Lumajang dalam menyebarluaskan informasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kabupaten Lumajang dan juga sebagai bahan evaluasi tim Humas Badan Narkotika Kabupaten Lumajang agar kegiatan yang dilakukan bisa berjalan lebih maksimal.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih baik sebagai literatur atau referensi bagi akademis yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan dunia hubungan masyarakat atau public relations.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagian humas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lumajang untuk mendalami

tentang bagaimana aktivitas humas dalam menginformasikan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di kabupaten Lumajang.

